

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agoeng Noegroho. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2013.
- E. S. Wiradipradja dan D. Budhijanto. *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law*. Jakarta: Suatu Pengantar. 2010.
- H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015.
- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Imbawani Djoko, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang. Setara Press. 2012
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang. Bayumedia Publishing. 2007.
- Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. PT Alumni. 2013
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Punaji Setyosari. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta. Kencana. 2010.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta. Putra Abardin. 1999.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2014
- Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*. Jakarta. Graha Ilmu. 2015.

Simon Josia A. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta. Yayasan Obor. 2016

Sony Keraf. *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta. Kanisius. 1997.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta. Liberty. 1959

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia. 2001

Syahrani Riduan H. *Seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. PT Alumni. 2006

Tjitrosudibio R. *Hukum Perdata*. Bogor. Balai Pustaka. 2016

Utrech E., *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Bogor. PT Penerbit dan Balai Buku, 1959.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku III KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 12/DRT/1951 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI atau POLRI Untuk Kepentingan Olahraga

### **C. INTERNET**

Tim BPKN, "Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia" dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id) diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul 22.00 WIB

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/933707-polisi-bongkar-jual-beli-senjata-api-online>  
diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul 22.00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring> diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul  
08.00 WIB

<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/09/142028226/penjualan.senjata.api.meningkat.drastis>  
diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul 22.00 WIB

